



**BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARITO KUALA
NOMOR 109 TAHUN 2017**

TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA
YANG BERSUMBER DARI APBD BAGI SETIAP DESA
DI KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 96 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa ketentuan pengalokasian dan pembagian Alokasi Dana Desa kepada setiap Desa diatur dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Barito Kuala tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan dan penetapan rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap desa Kabupaten Barito kuala tahun anggaran 2017;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten barito Kuala Tahun 2017 Nomor 46);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 14 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 Nomor 51);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA BAGI SETIAP DESA DI KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN ANGGARAN 2018**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan nasional dan berada di kabupaten Barito Kuala.
5. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintahan Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.
11. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran Desa pada Bank yang ditetapkan

BAB II
PENGALOKASIAN DAN PENGANGGARAN
ALOKASI DANA DESA

Pasal 2

- (1) Alokasi Dana Desa adalah bagian dari pendapatan Desa yang bersumber paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK).
- (2) Alokasi Dana Desa dialokasikan kepada Desa dalam rangka membantu capaian program Pemerintah Desa dan untuk percepatan pembangunan serta pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan desa.

Pasal 3

- (1) Anggaran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pasal 2 ayat (1) merupakan bagian dari Anggaran Belanja Daerah sebagai pos Belanja Bantuan Keuangan kepada Desa yang peruntukan dan pengelolaannya diserahkan kepada penerima bantuan.
- (2) Alokasi Dana Desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang merupakan bagian dari APBDesa.

BAB III
PENETAPAN RINCIAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu
Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa

Pasal 4

- (1) Besaran Alokasi Dana Desa yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp 64.785.093.440,- (enam puluh empat milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan puluh tiga ribu empat ratus empat puluh rupiah).
- (2) Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi kepada 195 (Seratus Sembilan Puluh Lima) Desa Se Kabupaten Barito Kuala dengan mempertimbangkan sebagai berikut :
 - a. Kebutuhan belanja pegawai dan insentif RT/RW; dan
 - b. Jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah, dan keterjangkauan desa.
- (3) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dan huruf b merupakan besaran nilai Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengalokasian Alokasi Dana Desa

Pasal 5

- (1) Perhitungan dan penetapan besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa terlebih dahulu memperhitungkan kebutuhan belanja pegawai dan insentif RT/RW untuk 1 (satu) tahun anggaran
- (2) Besaran Alokasi Dana Desa di Kabupaten Barito Kuala setelah dikurangi kebutuhan belanja pegawai sebagaimana ayat (1) dibagi secara proporsional dengan memperhatikan jumlah penduduk, tingkat kemiskinan, luas wilayah dan keterjangkauan desa.

Pasal 6

- (1) Besaran Alokasi Dana Desa dihitung dengan rumus, yaitu :

$$ADD_x = ADDBP_x + ADDP_x$$

ADD_x = Alokasi Dana Desa untuk Desa x
ADDBP_x = Alokasi Dana Desa untuk Belanja Pegawai Desa x
ADDP_x = Alokasi Dana Desa Proporsional untuk Desa x

- (2) Besaran Alokasi Dana Desa untuk Penghasilan Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa serta Insentif RT/RW ditetapkan tersendiri dalam peraturan Bupati.
- (3) Besaran Alokasi Dana Desa Proporsional untuk setiap Desa dihitung dengan rumus, yaitu :

$$ADDP_x = \frac{BD_x}{\sum BD} \times (ADDP)$$

ADDP_x = Alokasi Dana Desa Proporsional desa x
BD_x = Nilai Bobot Desa x
 $\sum BD$ = Jumlah Seluruh Nilai Bobot Desa
ADDP = Jumlah Alokasi Dana Desa proporsional Kabupaten

- (4) Penentuan Nilai Bobot Desa di hitung dengan rumus, yaitu :

$$BD_x = a_1.KV_x + a_2.KV_2x + a_3.KV_3x + \dots + a_n.KV_nx$$

BD_x = Nilai Bobot Desa x
a₁, a₂, ..., a_n = Angka Bobot masing-masing Variabel
KV = Koefisien Variabel pertama, kedua, ketiga dan seterusnya

- (5) Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Barito Kuala ini.

Bagian Ketiga Penganggaran

Pasal 7

- (1) Nilai Alokasi Dana Desa setiap Desa menjadi salah satu sumber pendapatan Desa yang sah dan harus dimasukkan didalam Dokumen APBDDesa.
- (2) Penganggaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasar pada program dan kegiatan pada RKPDesa yang merupakan penjabaran dari RPJMDesa.
- (3) Apabila terjadi perubahan besaran Alokasi Dana Desa maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus menyesuaikan dengan melakukan perubahan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

BAB IV
PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 8

- (1) Alokasi Dana Desa diprioritaskan untuk mendanai program dan kegiatan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pembinaan kemasyarakatan desa.
- (2) Selain digunakan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat digunakan untuk mendukung pelaksanaan pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, dan belanja tidak terduga.
- (3) Program dan kegiatan prioritas yang didanai dari Alokasi Dana Desa ditetapkan secara tersendiri dalam pedoman teknis penggunaan dana transfer kepada desa yang ditetapkan melalui peraturan Bupati.

BAB V
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 9

- (1) Penyaluran dana Alokasi Dana Desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa secara bertahap pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Dalam rangka penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa membuka Rekening Kas Desa pada bank umum pemerintah yang terdekat berdasarkan keputusan Kepala Desa.
- (3) Dalam hal terdapat perubahan Rekening Kas Desa sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Desa wajib menyampaikan pemberitahuan perubahan Rekening Kas Desa kepada Bupati dilampiri dengan :
 - a. Asli rekening Koran dari Rekening Kas Desa; dan
 - b. Salinan keputusan Kepala Desa mengenai penunjukan bank tempat Rekening Kas Desa

Pasal 10

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa secara bertahap sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (1) dilakukan secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Maret sebesar 20% (dua puluh persen);
 - b. Tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu ketiga bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. Tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen).
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa setiap tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah dana perimbangan ditransfer dari RKUN ke RKUD.
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa dilaksanakan berdasarkan permohonan oleh Kepala Desa kepada Bupati.

Pasal 11

- (1) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap I, dilaksanakan setelah Bupati menerima :
 - a. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa tahun sebelumnya

- b. Laporan Realisasi Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun sebelumnya
 - c. Peraturan Kepala Desa tentang Penghasilan Pemerintah Desa, Unsur Staf Perangkat Desa, BPD dan Insentif RT/RW.
 - d. Peraturan Kepala Desa tentang Pengeluaran Belanja Pegawai Bersifat Mengikat dan Operasional Perkantoran yang Mendahului Penetapan APBDesa Tahun 2018.
- (2) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap II, dilaksanakan setelah Bupati menerima :
- a. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa Tahap I
 - b. Peraturan Desa tentang RKPDesa
 - c. Peraturan Desa tentang APBDesa
- (3) Penyaluran Alokasi Dana Desa tahap III, dilaksanakan setelah Bupati menerima laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahap II dari Kepala Desa.
- (4) Penyaluran Alokasi Dana Desa setiap tahapan sebagaimana ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dilengkapi dengan dokumen pencairan sebagai berikut :
- a. Surat Pengantar dari Kepala Desa kepada Camat
 - b. Surat Permohonan Pencairan Alokasi Dana Desa dari Kepala Desa kepada Bupati;
 - c. Kwitansi pencairan Alokasi Dana Desa sesuai tahapan (bermaterai);
 - d. Surat pernyataan tanggungjawab mutlak (bermaterai);
 - e. Pakta integritas (bermaterai).
 - f. Surat pernyataan penggunaan Alokasi Dana Desa

Pasal 12

- (1) Berdasarkan permohonan dari Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (4), Tim Fasilitasi PKD Kecamatan melakukan pemeriksaan kelengkapan dokumen pencairan dan pemeriksaan SPJ untuk kelengkapan berkas permohonan pencairan Desa yang bersangkutan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dengan dilampiri :
- a. Surat pengantar dari Kepala Desa kepada DPMD;
 - b. Surat permohonan pencairan dari Pemerintah Desa beserta lampirannya;
 - c. Lembar ceklis kelengkapan dokumen pencairan dari Tim Fasilitasi PKD Kecamatan; dan
 - d. Lembar Pemeriksaan SPJ Alokasi Dana Desa
- (2) Berdasarkan surat pengantar Pencairan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPMD Kabupaten Barito Kuala menerbitkan surat permohonan pencairan Alokasi Dana Desa kepada kepala BPKAD dengan dilampiri :
- a. Surat permohonan pengajuan Pencairan Alokasi Dana Desa;
 - b. Ceklist Kelengkapan Dokumen Pencairan dari Tim Fasilitasi PKD Kecamatan
 - c. Kwitansi pencairan Alokasi Dana Desa sesuai tahapan (bermaterai)
 - d. Surat pernyataan penggunaan Alokasi Dana Desa;
 - e. Pakta integritas (bermaterai);
 - f. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak (bermaterai); dan
 - g. Print out rekening koran
- (3) Pengajuan pencairan dana tahap II dan III dapat dilaksanakan Desa apabila telah mempertanggungjawabkan dana tahap sebelumnya sebesar minimal 90 % (sembilan puluh perseratus) dengan dilampiri laporan realisasi fisik dan keuangan beserta surat pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa tahap sebelumnya dalam tahun anggaran berjalan.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Alokasi Dana Desa.
- (2) Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2018 terintegrasi dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDesa).
- (3) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada Bupati
- (4) Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas :
 - a. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. Laporan realisasi penggunaan Alokasi Dana Desa sesuai tahapan.
- (5) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilaksanakan melalui jalur struktural, yaitu Kepala desa disampaikan kepada Camat cq. Tim Fasilitasi Kecamatan paling lambat setiap tanggal 7 Tahun berikutnya.
- (6) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilaksanakan melalui jalur struktural, yaitu dari Kepala desa disampaikan kepada Camat cq. Tim Fasilitasi PKD Kecamatan sesuai tahapan pengajuan penyaluran Alokasi Dana Desa.
- (7) Tim Fasilitasi Kecamatan membuat rekapitulasi seluruh laporan dari tingkat Desa di wilayah kecamatan dilampiri laporan dari tingkat desa secara bertahap dilaporkan kepada Bupati cq Kepala DPMD untuk laporan bulanan setiap minggu kedua bulan berikutnya dan untuk laporan akhir tahun paling lambat minggu kedua bulan Januari tahun berikutnya.
- (8) Apabila Kepala Desa tidak menyampaikan laporan sesuai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka Tim Pembina dan Pengawas Pengelolaan Keuangan Desa akan melakukan pembinaan dan pengawasan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2018 secara langsung pada Desa yang bersangkutan.
- (9) Pelaporan ini diperlukan dalam rangka pengendalian dana untuk mengetahui perkembangan proses pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa yang meliputi :
 - a. Perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana;
 - b. Masalah yang dihadapi;
 - c. Hasil akhir penggunaan Alokasi Dana Desa;

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 14

- (1) Pengawasan dilaksanakan sebagai bentuk pengendalian terhadap pelaksanaan Alokasi Dana Desa. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengawasan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut :
 1. Pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana Desa dilakukan secara fungsional oleh pejabat berwenang dan oleh masyarakat sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 2. Dalam Organisasi Pemerintah Desa secara rutin setiap 3 (tiga) bulan sekali Kepala Desa melaksanakan pemeriksaan terhadap administrasi keuangan Alokasi Dana Desa yang dilakukan oleh Bendahara Desa dan dibuktikan dengan Berita Acara Pemeriksaan Kas;

3. Diluar organisasi Pemerintah Desa, pengawasan dilakukan oleh :
 - a. Pemerintah Kabupaten wajib membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.
 - b. Aparat pengawasan yaitu Inspektorat Kabupaten sebagai aparat pengawasan internal Pemerintah Kabupaten yang merupakan pengawasan umum terhadap penyelenggaraan pemerintah desa.
 - c. Camat berkewajiban membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Pasal 15

- (1) Pelayanan informasi mengenai Alokasi Dana Desa Tahun 2018 di Kabupaten Barito Kuala, sebagai berikut :
 1. Mengenai program dan kegiatan pada Badan Penelitian Pengembangan Pembangunan (Bapelitbang) Kabupaten Barito Kuala.
 2. Mengenai sistem pertanggungjawaban keuangan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Barito Kuala.
 3. Mengenai pembinaan administrasi, pelatihan, monitoring laporan hasil kinerja pembangunan pada Dinas PMD Kabupaten Barito Kuala.
 4. Pemantauan/pengawasan pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa serta mekanisme pencairan dan laporan keuangan oleh Camat dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat pada kecamatan setempat.
 5. Pemeriksaan hasil pembangunan dan keuangan pada Inspektorat Kabupaten Barito Kuala.

Pasal 16

- (1) Apabila sampai dengan akhir bulan Desember tahun anggaran berjalan pelaksanaan kegiatan belum selesai atau belum mencapai 100% dan terdapat sisa dana maka sisa dana Alokasi Dana Desa tersebut harus disetorkan ke Rekening Kas Desa;
- (2) Kepala Desa wajib menganggarkan kembali Sisa Alokasi Dana Desa dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya sebagai dasar penggunaan Sisa Alokasi Dana Desa tersebut.
- (3) Sisa Alokasi Dana Desa dapat digunakan mendahului penetapan peraturan desa tentang Perubahan APBDesa, setelah rancangan APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa
- (4) Penggunaan Sisa Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara menetapkan peraturan Kepala Desa tentang perubahan penjabaran APBDesa dan memberitahukan kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa atau dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Desa yang tidak melakukan Perubahan APBDesa
- (5) Sisa Lebih Perhitungan Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2017 dapat digunakan untuk :
 - a. Menutupi defisit anggaran apabila realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja;
 - b. Mendanai pelaksanaan kegiatan lanjutan; dan
 - c. Mendanai kewajiban lainnya yang sampai dengan akhir tahun anggaran belum diselesaikan.

Pasal 17

- (1) Kepala Desa tidak diperbolehkan menyimpan/membawa dana Alokasi Dana Desa dan tidak dibenarkan membuka rekening bank selain Rekening Kas Desa yang sudah dilaporkan ke Dinas PMD;
- (2) Bendahara wajib memungut pajak-pajak Negara sesuai dengan peraturan perundangan perpajakan yang berlaku dan menyetorkan ke Kas Negara;
- (3) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa
- (4) Jumlah uang dalam kas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
- (5) Pembiayaan pembangunan/fisik desa dilampiri dengan data dukung foto kegiatan mulai 0 %, 50 % dan 100 %;
- (6) Alokasi Dana Desa tidak diperbolehkan untuk kegiatan Politik Praktis, kegiatan melawan hukum dan tidak tumpang tindih dengan kegiatan yang sudah dibiayai dari sumber yang lain;
- (7) Anggaran Alokasi Dana Desa terintegrasi dalam APBDesa dan Pelanggaran atas peraturan dan tata cara yang telah ditetapkan di dalam penggunaan Alokasi Dana Desa berpedoman pada Sanksi yang tertuang dalam Peraturan Bupati Barito Kuala tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Pasal 18

Lembar ceklis kelengkapan dokumen pencairan desa dan lembar pemeriksaan SPJ desa dari Tim Fasilitasi PKD kecamatan, surat pertanggungjawaban mutlak telah menyelesaikan laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa tahun sebelumnya, Surat Pengantar dari desa ke DPMD, Surat Permohonan Pencairan ADD, kwitansi pencairan Alokasi Dana Desa sesuai tahapan (bermaterai), surat pernyataan penggunaan Alokasi Dana Desa (bermaterai), surat pernyataan tanggung jawab mutlak (bermaterai), pakta integritas (bermaterai) sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam lampiran Peraturan Bupati ini

BAB IV PENUTUP

Pasal 19

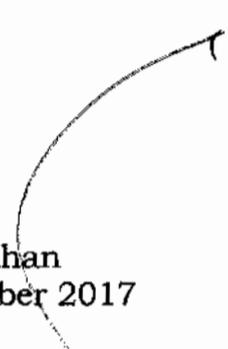
- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 56 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan dan Penetapan Rincian Alokasi Dana desa (ADD) Untuk Setiap Desa Kabupaten Barito Kuala Tahun Anggaran 2017 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut yang menyangkut teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan sampai dengan 31 Desember 2018;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 28 Desember 2017


BUPATI BARITO KUALA

Hj. NOORMILIYANI, AS

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 28 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA


H. SUPRIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 NOMOR

Lampiran : Peraturan Bupati Barito Kuala
 Nomor 109 Tahun 2017
 Tanggal 28 Desember 2017

**PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA
 BAGI DESA SE KABUPATEN BARITO KUALA
 TAHUN ANGGARAN 2018**

| NO | KECAMATAN | DESA | JUMLAH ADD | TAHAP I 20% | TAHAP II 40% | TAHAP III 40% |
|----|-------------|---------------------|-------------|----------------|-----------------|------------------|
| 1 | TABUNGANEN | TANGGUL REJO | 367,773,100 | 73,554,620 | 147,109,240 | 147,109,240 |
| 2 | TABUNGANEN | SUNGAI TERAS DALAM | 320,228,700 | 64,045,740 | 128,091,480 | 128,091,480 |
| 3 | TABUNGANEN | KUALA LUPAK | 321,317,400 | 64,263,480 | 128,526,960 | 128,526,960 |
| 4 | TABUNGANEN | SUNGAI TERAS LUAR | 320,050,900 | 64,010,180 | 128,020,360 | 128,020,360 |
| 5 | TABUNGANEN | TABUNGANEN TENGAH | 325,450,900 | 65,090,180 | 130,180,360 | 130,180,360 |
| 6 | TABUNGANEN | BERINGIN KENCANA | 327,073,100 | 65,414,620 | 130,829,240 | 130,829,240 |
| 7 | TABUNGANEN | KARYA BARU | 325,450,900 | 65,090,180 | 130,180,360 | 130,180,360 |
| 8 | TABUNGANEN | TABUNGANEN PEMURUS | 405,217,440 | 81,043,488 | 162,086,976 | 162,086,976 |
| 9 | TABUNGANEN | SUNGAI JINGAH BESAR | 311,228,700 | 62,245,740 | 124,491,480 | 124,491,480 |
| 10 | TABUNGANEN | SUNGAI TELAN MUARA | 311,228,700 | 62,245,740 | 124,491,480 | 124,491,480 |
| 11 | TABUNGANEN | SUNGAI TELAN KECIL | 313,028,700 | 62,605,740 | 125,211,480 | 125,211,480 |
| 12 | TABUNGANEN | TABUNGANEN KECIL | 348,506,500 | 69,701,300 | 139,402,600 | 139,402,600 |
| 13 | TABUNGANEN | SUNGAI TELAN BESAR | 328,873,100 | 65,774,620 | 131,549,240 | 131,549,240 |
| 14 | TABUNGANEN | TABUNGANEN MUARA | 325,450,900 | 65,090,180 | 130,180,360 | 130,180,360 |
| 15 | TAMBAN | TAMBAN MUARA | 367,773,100 | 73,554,620 | 147,109,240 | 147,109,240 |
| 16 | TAMBAN | TAMBAN BANGUN | 334,628,700 | 66,925,740 | 133,851,480 | 133,851,480 |
| 17 | TAMBAN | DAMSARI | 316,450,900 | 63,290,180 | 126,580,360 | 126,580,360 |
| 18 | TAMBAN | TAMBAN MUARA BARU | 330,850,900 | 66,170,180 | 132,340,360 | 132,340,360 |
| 19 | TAMBAN | SEKATA BARU | 334,450,900 | 66,890,180 | 133,780,360 | 133,780,360 |
| 20 | TAMBAN | TAMBAN BANGUN BARU | 314,828,700 | 62,965,740 | 125,931,480 | 125,931,480 |
| 21 | TAMBAN | KOANDA | 316,450,900 | 63,290,180 | 126,580,360 | 126,580,360 |
| 22 | TAMBAN | PURWOSARI BARU | 346,873,100 | 69,374,620 | 138,749,240 | 138,749,240 |
| 23 | TAMBAN | TAMBAN SARI BARU | 316,450,900 | 63,290,180 | 126,580,360 | 126,580,360 |
| 24 | TAMBAN | TAMBAN KECIL | 330,673,100 | 66,134,620 | 132,269,240 | 132,269,240 |
| 25 | TAMBAN | PURWOSARI II | 357,150,900 | 71,430,180 | 142,860,360 | 142,860,360 |
| 26 | TAMBAN | JELAPAT I | 423,039,600 | 84,607,920 | 169,215,840 | 169,215,840 |
| 27 | TAMBAN | JELAPAT BARU | 378,573,100 | 75,714,620 | 151,429,240 | 151,429,240 |
| 28 | TAMBAN | SIDOREJO | 316,628,700 | 63,325,740 | 126,651,480 | 126,651,480 |
| 29 | TAMBAN | TINGGIRAN II | 403,595,200 | 80,719,040 | 161,438,080 | 161,438,080 |
| 30 | TAMBAN | PURWOSARI I | 387,750,900 | 77,550,180 | 155,100,360 | 155,100,360 |
| 31 | MEKARSARI | INDAH SARI | 314,828,700 | 62,965,740 | 125,931,480 | 125,931,480 |
| 32 | MEKARSARI | TINGGIRAN BARU | 341,473,100 | 68,294,620 | 136,589,240 | 136,589,240 |
| 33 | MEKARSARI | KARANG MEKAR | 314,650,800 | 62,930,160 | 125,860,320 | 125,860,320 |
| 34 | MEKARSARI | TINGGIRAN DARAT | 355,695,200 | 71,139,040 | 142,278,080 | 142,278,080 |
| 35 | MEKARSARI | TINGGIRAN TENGAH | 321,673,100 | 64,334,620 | 128,669,240 | 128,669,240 |
| 36 | MEKARSARI | JELAPAT II | 328,695,200 | 65,739,040 | 131,478,080 | 131,478,080 |
| 37 | MEKARSARI | TAMBAN RAYA | 345,073,100 | 69,014,620 | 138,029,240 | 138,029,240 |
| 38 | MEKARSARI | TAMBAN RAYA BARU | 328,873,100 | 65,774,620 | 131,549,240 | 131,549,240 |
| 39 | MEKARSARI | MEKARSARI | 389,373,100 | 77,874,620 | 155,749,240 | 155,749,240 |
| 40 | ANJIR PASAR | MENTAREN | 309,428,700 | 61,885,740 | 123,771,480 | 123,771,480 |
| 41 | ANJIR PASAR | GANDARAYA | 309,428,700 | 61,885,740 | 123,771,480 | 123,771,480 |
| 42 | ANJIR PASAR | GANDARIA | 311,228,700 | 62,245,740 | 124,491,480 | 124,491,480 |
| 43 | ANJIR PASAR | DANAU KARYA | 320,050,900 | 64,010,180 | 128,020,360 | 128,020,360 |

| | | | | | | |
|----|-------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 44 | ANJIR PASAR | PANDAN SARI | 311,228,700 | 62,245,740 | 124,491,480 | 124,491,480 |
| 45 | ANJIR PASAR | ANJIR SEBERANG PASAR II | 323,473,100 | 64,694,620 | 129,389,240 | 129,389,240 |
| 46 | ANJIR PASAR | BANYIUR | 318,073,100 | 63,614,620 | 127,229,240 | 127,229,240 |
| 47 | ANJIR PASAR | ANJIR SEBERANG PASAR | 321,673,100 | 64,334,620 | 128,669,240 | 128,669,240 |
| 48 | ANJIR PASAR | ANDAMAN | 321,850,900 | 64,370,180 | 128,740,360 | 128,740,360 |
| 49 | ANJIR PASAR | HILIR MESJID | 314,650,900 | 62,930,180 | 125,860,360 | 125,860,360 |
| 50 | ANJIR PASAR | ANJIR PASAR KOTA II | 369,750,900 | 73,950,180 | 147,900,360 | 147,900,360 |
| 51 | ANJIR PASAR | ANJIR PASAR LAMA | 369,750,900 | 73,950,180 | 147,900,360 | 147,900,360 |
| 52 | ANJIR PASAR | ANDAMAN II | 323,650,900 | 64,730,180 | 129,460,360 | 129,460,360 |
| 53 | ANJIR PASAR | ANJIR PASAR KOTA | 351,928,700 | 70,385,740 | 140,771,480 | 140,771,480 |
| 54 | ANJIR PASAR | BARUNAI BARU | 307,628,700 | 61,525,740 | 123,051,480 | 123,051,480 |
| 55 | ANJIR MUARA | ANJIR SERAPAT BARU I | 314,650,900 | 62,930,180 | 125,860,360 | 125,860,360 |
| 56 | ANJIR MUARA | ANJIR SERAPAT MUARA | 311,406,500 | 62,281,300 | 124,562,600 | 124,562,600 |
| 57 | ANJIR MUARA | ANJIR SERAPAT LAMA | 307,628,700 | 61,525,740 | 123,051,480 | 123,051,480 |
| 58 | ANJIR MUARA | SUNGAI PUNGGU LAMA | 312,850,900 | 62,570,180 | 125,140,360 | 125,140,360 |
| 59 | ANJIR MUARA | PATIH MUHUR BARU | 305,828,700 | 61,165,740 | 122,331,480 | 122,331,480 |
| 60 | ANJIR MUARA | ANJIR SERAPAT BARU | 321,673,100 | 64,334,620 | 128,669,240 | 128,669,240 |
| 61 | ANJIR MUARA | SEPAKAT BERSAMA | 307,628,700 | 61,525,740 | 123,051,480 | 123,051,480 |
| 62 | ANJIR MUARA | ANJIR SERAPAT MUARA I | 329,050,900 | 65,810,180 | 131,620,360 | 131,620,360 |
| 63 | ANJIR MUARA | PATIH MUHUR LAMA | 311,228,700 | 62,245,740 | 124,491,480 | 124,491,480 |
| 64 | ANJIR MUARA | SUNGAI PUNGGU BARU | 320,050,900 | 64,010,180 | 128,020,360 | 128,020,360 |
| 65 | ANJIR MUARA | ANJIR MUARA KOTA TENGAH | 371,373,100 | 74,274,620 | 148,549,240 | 148,549,240 |
| 66 | ANJIR MUARA | MARABAHAN BARU | 311,406,500 | 62,281,300 | 124,562,600 | 124,562,600 |
| 67 | ANJIR MUARA | ANJIR MUARA KOTA | 364,706,500 | 72,941,300 | 145,882,600 | 145,882,600 |
| 68 | ANJIR MUARA | BERINGIN JAYA | 311,050,900 | 62,210,180 | 124,420,360 | 124,420,360 |
| 69 | ANJIR MUARA | ANJIR MUARA LAMA | 355,350,900 | 71,070,180 | 142,140,360 | 142,140,360 |
| 70 | ALALAK | SUNGAI LUMBAAH | 373,528,700 | 74,705,740 | 149,411,480 | 149,411,480 |
| 71 | ALALAK | SUNGAI PITUNG | 318,606,500 | 63,721,300 | 127,442,600 | 127,442,600 |
| 72 | ALALAK | BELANDEAN | 339,850,900 | 67,970,180 | 135,940,360 | 135,940,360 |
| 73 | ALALAK | PULAU SUGARA | 331,028,700 | 66,205,740 | 132,411,480 | 132,411,480 |
| 74 | ALALAK | SEMANGAT BAKTI | 311,406,500 | 62,281,300 | 124,562,600 | 124,562,600 |
| 75 | ALALAK | PULAU ALALAK | 340,028,700 | 68,005,740 | 136,011,480 | 136,011,480 |
| 76 | ALALAK | BELANDEAN MUARA | 329,228,700 | 65,845,740 | 131,691,480 | 131,691,480 |
| 77 | ALALAK | SEMANGAT KARYA | 315,006,500 | 63,001,300 | 126,002,600 | 126,002,600 |
| 78 | ALALAK | TATAH MESJID | 359,473,100 | 71,894,620 | 143,789,240 | 143,789,240 |
| 79 | ALALAK | PANCA KARYA | 302,584,400 | 60,516,880 | 121,033,760 | 121,033,760 |
| 80 | ALALAK | BERINGIN | 385,950,900 | 77,190,180 | 154,380,360 | 154,380,360 |
| 81 | ALALAK | PULAU SEWANGI | 332,828,700 | 66,565,740 | 133,131,480 | 133,131,480 |
| 82 | ALALAK | TANJUNG HARAPAN | 314,650,900 | 62,930,180 | 125,860,360 | 125,860,360 |
| 83 | ALALAK | BERANGAS TIMUR | 416,373,100 | 83,274,620 | 166,549,240 | 166,549,240 |
| 84 | ALALAK | SEMANGAT DALAM | 466,595,200 | 93,319,040 | 186,638,080 | 186,638,080 |
| 85 | MANDASTANA | SUNGAI RAMANIA | 313,206,500 | 62,641,300 | 125,282,600 | 125,282,600 |
| 86 | MANDASTANA | TATAH ALAYUNG | 311,406,500 | 62,281,300 | 124,562,600 | 124,562,600 |
| 87 | MANDASTANA | ANTASAN SEGARA | 314,828,700 | 62,965,740 | 125,931,480 | 125,931,480 |
| 88 | MANDASTANA | PUNTIK LUAR | 323,828,700 | 64,765,740 | 129,531,480 | 129,531,480 |
| 89 | MANDASTANA | PANTAI HAMBAWANG | 320,050,900 | 64,010,180 | 128,020,360 | 128,020,360 |
| 90 | MANDASTANA | LOK RAWA | 322,028,700 | 64,405,740 | 128,811,480 | 128,811,480 |
| 91 | MANDASTANA | TANIPAH | 314,828,700 | 62,965,740 | 125,931,480 | 125,931,480 |
| 92 | MANDASTANA | KARANG INDAH | 362,906,500 | 72,581,300 | 145,162,600 | 145,162,600 |
| 93 | MANDASTANA | TERANTANG | 353,895,200 | 70,779,040 | 141,558,080 | 141,558,080 |
| 94 | MANDASTANA | BANGKIT BARU | 307,806,500 | 61,561,300 | 123,122,600 | 123,122,600 |
| 95 | MANDASTANA | KARANG BUNGA | 347,228,700 | 69,445,740 | 138,891,480 | 138,891,480 |
| 96 | MANDASTANA | PUNTIK DALAM | 314,828,700 | 62,965,740 | 125,931,480 | 125,931,480 |

| | | | | | | |
|-----|---------------|----------------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 97 | MANDASTANA | PUNTIK TENGAH | 362,728,700 | 72,545,740 | 145,091,480 | 145,091,480 |
| 98 | MANDASTANA | TABING RIMBAH | 369,750,900 | 73,950,180 | 147,900,360 | 147,900,360 |
| 99 | BELAWANG | RANGGA SURYA | 304,206,500 | 60,841,300 | 121,682,600 | 121,682,600 |
| 100 | BELAWANG | PATIH SALERA | 321,850,900 | 64,370,180 | 128,740,360 | 128,740,360 |
| 101 | BELAWANG | SAMUDA | 311,228,700 | 62,245,740 | 124,491,480 | 124,491,480 |
| 102 | BELAWANG | MURUNG KERAMAT | 307,628,700 | 61,525,740 | 123,051,480 | 123,051,480 |
| 103 | BELAWANG | PARIMATA | 314,828,700 | 62,965,740 | 125,931,480 | 125,931,480 |
| 104 | BELAWANG | SUKARAMAI | 309,606,500 | 61,921,300 | 123,842,600 | 123,842,600 |
| 105 | BELAWANG | BAMBANGIN | 302,584,400 | 60,516,880 | 121,033,760 | 121,033,760 |
| 106 | BELAWANG | BINAAN BARU | 309,428,700 | 61,885,740 | 123,771,480 | 123,771,480 |
| 107 | BELAWANG | KARANG BUAH | 307,984,400 | 61,596,880 | 123,193,760 | 123,193,760 |
| 108 | BELAWANG | SUNGAI SELUANG | 304,206,500 | 60,841,300 | 121,682,600 | 121,682,600 |
| 109 | BELAWANG | KARANG DUKUH | 322,206,500 | 64,441,300 | 128,882,600 | 128,882,600 |
| 110 | BELAWANG | BELAWANG | 355,528,700 | 71,105,740 | 142,211,480 | 142,211,480 |
| 111 | BELAWANG | SUNGAI SELUANG PASAR | 350,306,500 | 70,061,300 | 140,122,600 | 140,122,600 |
| 112 | JEJANGKIT | CAHAYA BARU | 320,228,700 | 64,045,740 | 128,091,480 | 128,091,480 |
| 113 | JEJANGKIT | BAHANDANG | 309,428,700 | 61,885,740 | 123,771,480 | 123,771,480 |
| 114 | JEJANGKIT | SAMPURNA | 323,828,700 | 64,765,740 | 129,531,480 | 129,531,480 |
| 115 | JEJANGKIT | JEJANGKIT MUARA | 316,628,700 | 63,325,740 | 126,651,480 | 126,651,480 |
| 116 | JEJANGKIT | JEJANGKIT PASAR | 320,050,900 | 64,010,180 | 128,020,360 | 128,020,360 |
| 117 | JEJANGKIT | JEJANGKIT BARAT | 314,828,700 | 62,965,740 | 125,931,480 | 125,931,480 |
| 118 | JEJANGKIT | JEJANGKIT TIMUR | 332,295,200 | 66,459,040 | 132,918,080 | 132,918,080 |
| 119 | WANARAYA | WARINGIN KENCANA | 311,584,400 | 62,316,880 | 124,633,760 | 124,633,760 |
| 120 | WANARAYA | ROHAM RAYA | 370,106,500 | 74,021,300 | 148,042,600 | 148,042,600 |
| 121 | WANARAYA | BABAT RAYA | 318,784,400 | 63,756,880 | 127,513,760 | 127,513,760 |
| 122 | WANARAYA | PINANG HABANG | 355,706,500 | 71,141,300 | 142,282,600 | 142,282,600 |
| 123 | WANARAYA | DWI PASARI | 318,428,700 | 63,685,740 | 127,371,480 | 127,371,480 |
| 124 | WANARAYA | TUMIH | 315,184,400 | 63,036,880 | 126,073,760 | 126,073,760 |
| 125 | WANARAYA | SIDOMULYO | 377,306,500 | 75,461,300 | 150,922,600 | 150,922,600 |
| 126 | WANARAYA | KOLAM KIRI | 370,106,500 | 74,021,300 | 148,042,600 | 148,042,600 |
| 127 | WANARAYA | SUMBER RAHAYU | 362,906,500 | 72,581,300 | 145,162,600 | 145,162,600 |
| 128 | WANARAYA | SIMPANG JAYA | 355,706,500 | 71,141,300 | 142,282,600 | 142,282,600 |
| 129 | WANARAYA | KOLAM KANAN | 373,528,700 | 74,705,740 | 149,411,480 | 149,411,480 |
| 130 | WANARAYA | SURYA KANTA | 361,106,500 | 72,221,300 | 144,442,600 | 144,442,600 |
| 131 | WANARAYA | KOLAM MAKMUR | 386,128,700 | 77,225,740 | 154,451,480 | 154,451,480 |
| 132 | RANTAU BADAUH | SUNGAI PANTAI | 357,150,900 | 71,430,180 | 142,860,360 | 142,860,360 |
| 133 | RANTAU BADAUH | SIMPANG ARJA | 311,228,700 | 62,245,740 | 124,491,480 | 124,491,480 |
| 134 | RANTAU BADAUH | DANDA JAYA | 409,350,900 | 81,870,180 | 163,740,360 | 163,740,360 |
| 135 | RANTAU BADAUH | SINAR BARU | 320,228,700 | 64,045,740 | 128,091,480 | 128,091,480 |
| 136 | RANTAU BADAUH | SUNGAI SAHURAI | 325,450,900 | 65,090,180 | 130,180,360 | 130,180,360 |
| 137 | RANTAU BADAUH | SUNGAI GAMPA | 373,528,700 | 74,705,740 | 149,411,480 | 149,411,480 |
| 138 | RANTAU BADAUH | PINDAHAN BARU | 353,728,700 | 70,745,740 | 141,491,480 | 141,491,480 |
| 139 | RANTAU BADAUH | SUNGAI BAMBAN | 350,128,700 | 70,025,740 | 140,051,480 | 140,051,480 |
| 140 | RANTAU BADAUH | SUNGAI GAMPA ASAHI | 366,150,900 | 73,230,180 | 146,460,360 | 146,460,360 |
| 141 | BARAMBAI | KARYA TANI | 318,250,900 | 63,650,180 | 127,300,360 | 127,300,360 |
| 142 | BARAMBAI | SUNGAI KALI | 375,328,700 | 75,065,740 | 150,131,480 | 150,131,480 |
| 143 | BARAMBAI | KARYA BARU | 321,850,900 | 64,370,180 | 128,740,360 | 128,740,360 |
| 144 | BARAMBAI | HANDIL BARABAI | 306,184,300 | 61,236,860 | 122,473,720 | 122,473,720 |
| 145 | BARAMBAI | BAGAGAP | 327,250,900 | 65,450,180 | 130,900,360 | 130,900,360 |
| 146 | BARAMBAI | PENDALAMAN BARU | 316,806,500 | 63,361,300 | 126,722,600 | 126,722,600 |
| 147 | BARAMBAI | PENDALAMAN | 315,006,500 | 63,001,300 | 126,002,600 | 126,002,600 |
| 148 | BARAMBAI | BARAMBAI | 360,928,700 | 72,185,740 | 144,371,480 | 144,371,480 |
| 149 | BARAMBAI | KOLAM KIRI DALAM | 375,328,700 | 75,065,740 | 150,131,480 | 150,131,480 |

| | | | | | | |
|---------------|-----------|----------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 150 | BARAMBAI | BARAMBAI KOLAM KANAN | 329,228,700 | 65,845,740 | 131,691,480 | 131,691,480 |
| 151 | BARAMBAI | BARAMBAI KOLAM KIRI | 393,328,700 | 78,665,740 | 157,331,480 | 157,331,480 |
| 152 | CERBON | BADANDAN | 313,028,700 | 62,605,740 | 125,211,480 | 125,211,480 |
| 153 | CERBON | SAWAHAN | 326,895,200 | 65,379,040 | 130,758,080 | 130,758,080 |
| 154 | CERBON | SIMPANG NUNGKI | 314,828,700 | 62,965,740 | 125,931,480 | 125,931,480 |
| 155 | CERBON | SUNGAI KAMBAT | 312,850,900 | 62,570,180 | 125,140,360 | 125,140,360 |
| 156 | CERBON | SUNGAI RAYA | 300,784,400 | 60,156,880 | 120,313,760 | 120,313,760 |
| 157 | CERBON | SUNGAI RASAU | 307,628,700 | 61,525,740 | 123,051,480 | 123,051,480 |
| 158 | CERBON | SUNGAI TUNJANG | 304,206,500 | 60,841,300 | 121,682,600 | 121,682,600 |
| 159 | CERBON | BANTUIL | 366,328,700 | 73,265,740 | 146,531,480 | 146,531,480 |
| 160 | BAKUMPAI | BANITAN | 311,050,900 | 62,210,180 | 124,420,360 | 124,420,360 |
| 161 | BAKUMPAI | PALINGKAU | 326,895,200 | 65,379,040 | 130,758,080 | 130,758,080 |
| 162 | BAKUMPAI | SUNGAI LIRIK | 309,250,900 | 61,850,180 | 123,700,360 | 123,700,360 |
| 163 | BAKUMPAI | MURUNG RAYA | 307,806,500 | 61,561,300 | 123,122,600 | 123,122,600 |
| 164 | BAKUMPAI | BANUA ANYAR | 311,228,700 | 62,245,740 | 124,491,480 | 124,491,480 |
| 165 | BAKUMPAI | BAHALAYUNG | 306,006,500 | 61,201,300 | 122,402,600 | 122,402,600 |
| 166 | BAKUMPAI | BATIK | 306,006,500 | 61,201,300 | 122,402,600 | 122,402,600 |
| 167 | BAKUMPAI | BALUKUNG | 314,650,900 | 62,930,180 | 125,860,360 | 125,860,360 |
| 168 | MARABAHAN | ANTAR JAYA | 309,606,500 | 61,921,300 | 123,842,600 | 123,842,600 |
| 169 | MARABAHAN | SIDO MAKMUR | 309,784,400 | 61,956,880 | 123,913,760 | 123,913,760 |
| 170 | MARABAHAN | ANTAR RAYA | 357,150,900 | 71,430,180 | 142,860,360 | 142,860,360 |
| 171 | MARABAHAN | ANTAR BARU | 311,228,700 | 62,245,740 | 124,491,480 | 124,491,480 |
| 172 | MARABAHAN | BAGUS | 351,928,700 | 70,385,740 | 140,771,480 | 140,771,480 |
| 173 | MARABAHAN | PENGHULU | 336,262,100 | 67,252,420 | 134,504,840 | 134,504,840 |
| 174 | MARABAHAN | BALIUK | 293,762,100 | 58,752,420 | 117,504,840 | 117,504,840 |
| 175 | MARABAHAN | KARYA MAJU | 304,384,400 | 60,876,880 | 121,753,760 | 121,753,760 |
| 176 | TABUKAN | PANTANG RAYA | 311,228,700 | 62,245,740 | 124,491,480 | 124,491,480 |
| 177 | TABUKAN | TAMBA JAYA | 311,050,800 | 62,210,160 | 124,420,320 | 124,420,320 |
| 178 | TABUKAN | KARYA INDAH | 314,650,800 | 62,930,160 | 125,860,320 | 125,860,320 |
| 179 | TABUKAN | RANTAU BAMBAN | 302,406,500 | 60,481,300 | 120,962,600 | 120,962,600 |
| 180 | TABUKAN | KARYA MAKMUR | 314,650,800 | 62,930,160 | 125,860,320 | 125,860,320 |
| 181 | TABUKAN | PANTANG BARU | 306,006,500 | 61,201,300 | 122,402,600 | 122,402,600 |
| 182 | TABUKAN | KARYA JADI | 346,706,500 | 69,341,300 | 138,682,600 | 138,682,600 |
| 183 | TABUKAN | MUARA PULAU | 328,517,500 | 65,703,500 | 131,407,000 | 131,407,000 |
| 184 | TABUKAN | BANDAR KARYA | 304,384,300 | 60,876,860 | 121,753,720 | 121,753,720 |
| 185 | TABUKAN | TELUK TAMBA | 348,328,700 | 69,665,740 | 139,331,480 | 139,331,480 |
| 186 | TABUKAN | TABUKAN RAYA | 348,506,500 | 69,701,300 | 139,402,600 | 139,402,600 |
| 187 | KURIPAN | KABUAU | 323,117,400 | 64,623,480 | 129,246,960 | 129,246,960 |
| 188 | KURIPAN | ASIA BARU | 318,073,100 | 63,614,620 | 127,229,240 | 127,229,240 |
| 189 | KURIPAN | JAMBU BARU | 330,139,600 | 66,027,920 | 132,055,840 | 132,055,840 |
| 190 | KURIPAN | JAMBU | 319,695,200 | 63,939,040 | 127,878,080 | 127,878,080 |
| 191 | KURIPAN | KURIPAN | 325,450,900 | 65,090,180 | 130,180,360 | 130,180,360 |
| 192 | KURIPAN | TABATAN | 328,339,600 | 65,667,920 | 131,335,840 | 131,335,840 |
| 193 | KURIPAN | TABATAN BARU | 333,739,600 | 66,747,920 | 133,495,840 | 133,495,840 |
| 194 | KURIPAN | JARENANG | 312,850,900 | 62,570,180 | 125,140,360 | 125,140,360 |
| 195 | KURIPAN | RIMBUN TULANG | 318,250,900 | 63,650,180 | 127,300,360 | 127,300,360 |
| JUMLAH | | | 64,785,093,440 | 12,957,018,688 | 25,914,037,376 | 25,914,037,376 |

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILYANI, AS